

*Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong  
Tahun 2016*

**LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  
SIBORONGBORONG 018.06.0700.239420**

Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2016



Alamat Kantor:  
JI. RAYA DOLOK SANGGUL KM 1 SIBORONGBORONG  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
PROPINSI SUMATERA UTARA 20127

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Siborongborong, 30 Juni 2016  
Kepala,

Drh.Vierman  
NIP 19651220 199204 1003

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siborongborong, 30 Juni 2016

Kepala,

Drh.Vierman  
NIP 19651220 199203 1 003

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I.    LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	2
II.   NERACA .....	3
III.  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3
A.    PENJELASAN UMUM .....	7
A.1  DASAR HUKUM.....	7
A.3  PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	8
A.4  KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	8
(1)  Pendapatan .....	9
(2)  Belanja.....	9
(3)  Aset .....	9
(4)  Kewajiban .....	12
(5)  Ekuitas Dana .....	13
(6)  Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	13
(7)  Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap .....	14
B.    PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	15
B.1  Pendapatan Negara dan Hibah .....	15
B.2  Belanja Negara .....	177
B.2.1  Belanja Pegawai .....	188
B.2.2  Belanja Barang .....	199
B. 2.3  Belanja Modal .....	20
C.    PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	221
C.1.1  Persediaan.....	221
C.2.1  Tanah .....	23
C.2.2  Peralatan dan Mesin .....	23
C.2.3  Gedung dan Bangunan .....	24
C.2.4  Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	2525
C.2.5  Aset Tetap Lainnya .....	2525

C.2.6 Akumulasi Penyusutan.....	25
KEWAJIBAN.....	27
C.5 Kewajiban Jangka Pendek .....	27
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga .....	277
EKUITAS.....	288
C.6 Ekuitas Dana Lancar .....	288
D.  PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA .....	288

LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

  LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

  LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

LAPORAN BARANG PENGGUNA

DAFTAR INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015	2
Tabel 2 : Ringkasan Neraca per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015	3
Tabel 3 : Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015	5
Tabel 4 : Neraca per 30 Juni 2015 dan 2015	6
Tabel 5 : Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 6 : Masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat	15
Tabel 7 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN	16
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Sem.I TA 2016 dan 2015	17
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2016	17
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Sem. I TA 2016 dan Sem.I 2015	18
Tabel 11 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016	19
Tabel 12 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016	20
Tabel 13 : <i>Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2016 dan 2015</i>	20
Tabel 14 : Rincian Aset lancar per 30 Juni 2016 dan 2015	21
Tabel 15 : Rincian persediaan	21
Tabel 16 : Rincian Aset tetap	22
Tabel 17 : Mutasi aset tanah pertanggal laporan	23
Tabel 18 : Mutasi nilai aset peralatan dan mesin pertanggal laporan	24
Tabel 19 : Mutasi nilai aset Gedung dan Bnagunan pertanggal laporan	24
Tabel 20 : Mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan pertanggal pelaporan	25
Tabel 21 : Mutasi nilai aset tetap lainnya pertanggal laporan	25

*Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong  
Tahun 2016*

Tabel 22	: Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2016	26
Tabel 23	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	27
Tabel 24	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	27
Tabel 25	: Rincian Ekuitas dan kewajiban Jangka Pendek	28

**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Hal</b>
Lampiran 3 : Hasil Rekonsiliasi SAU-SAI dengan KPPN setempat	xx
Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Pengeluaran	xx
Lampiran 6 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Penerimaan	xx
Lampiran 7 : SSBP terkait penyetoran Kas Di Bendahara Penerimaan (PNBP)	xx
Lampiran 8 : SSBP terkait penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas (Jasa Giro)	xx
Lampiran 9 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan 30 Juni 2016 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik	xx
Lampiran 13 : Rincian akumulasi penyusutan aset tetap 30 Juni 2016	xx
Lampiran 16 : Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016	xx
Lampiran 17 : Rekening Pemerintah per 30 Juni 2016	xx



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kantor Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong 30 Juni 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kantor Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong 30 Juni 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 30 Juni 2016

Realisasi Pendapatan Negara pada Sem. I TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukar Pajak sebesar Rp. 1.407.986.427,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 3.890.614.031,- atau mencapai 11,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.33.437.973,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Periode 30 Juni 2016*  
*dan 30 Juni 2015 (dalam Rupiah)*

Uraian	Sem. I 2016			Sem. II 2015
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan</b>	350.000.000	1.407.986.427	402,28	453.425.950
<b>Belanja Negara</b>	33.437.973.000	3.890.614.031	11,64	40.872.496.992

## II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2016 dan 2015

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 700.434.150,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 579.681.150.00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 120.753.000.00;

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 579.681.150,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 120.753.000,00

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2016

Uraian	Juni 2016	30 juni 2015	Kenaikan	
			Rp	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	579.681.150	442.796.000	136.885.150	76,37
Aset Tetap	120.753.000.	174.890.793.787	(174.770.040.787)	0
<b>Jumlah Aset</b>	<b>700.434.150</b>	<b>175.333.589.787</b>	<b>10.452.949.39</b>	<b>76.37</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jk Pendek	579.681.150	259.441.395	320.239.755	44,76
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>579.681.150</b>	<b>259.441.39</b>	<b>320.239.755</b>	<b>44,76</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	120.753.000	175.074.148.392	(174.953.395.392)	0
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>120.753.000</b>	<b>175.074148.392</b>	<b>24.627.704.546</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>700.434.150</b>	<b>175.333.589.787</b>	<b>(174.633.155.637)</b>	<b>0</b>

## III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

**Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.**

**Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2016, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.**

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  
SIBORONGBORONG LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2016  
DAN 30 Juni 2015**

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMI I TA 2016		% thd Anng	SEM.I TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	350.000.000	1.407.986.427	402,28	291.936.284
<b>Jum Pendpt Negara &amp; Hibah</b>		<b>350.000.000</b>	<b>1.407.986.427</b>	<b>402,28</b>	<b>291.936.284</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2.</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	5.987.429.000	2.136.141.139	35,68	2.342.355.946
2. Belanja Barang	B.2.2.	13.102.254.000	1.633.719.892	12,47	2.321.026.260
3. Belanja Modal	B.2.3.	14.348.290.000	120.753.000	0,84	97.540.000
4. Belanja Sosial	B.2.4.	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>33.437.973.000</b>	<b>3.890.614.031</b>	<b>11,64</b>	<b>4.760.922.206</b>

Siborongborong, 30 Juni 2016

Kepala,

Drh.Vierman  
NIP 19651220 199203 1 003

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  
SIBORONGBORONG NERACA  
PER 30 Juni 2016 DAN 2015**

Tabel 4. Neraca per 30 Juni 2015 dan Juni 2015

Uraian	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
<b>ASET</b>	C.1		
<b>ASET LANCAR</b>	C.1.1	0	0
Persediaan		579.681.150	442.796.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>789.079.000</b>	<b>442.796.000</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	0	165.458.400.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	120.753.000	3.113.783.233
Gedung dan Bangunan	C.2.3	0	8.751.039.599
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	0	1.663.471.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>120.753.000</b>	<b>174.890.793.787</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>700.434.150</b>	<b>175.333.589.787</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.5		
Uang Muka ke KPPN	C.5.1	579.681.150	249.905.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	0	9.536.395
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>579.681.150</b>	<b>259.441.395</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>579.681.150</b>	<b>259.441.395</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	C.6		
		186.592.284.277	161.964.579.731
		186.592.284.277	161.964.579.731
<b>EKUITAS DANA</b>	C.7		
		120.753.000	175.074.148.392
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>		<b>20.753.000277</b>	<b>175.074.148.392.731</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>120.753.000</b>	<b>175.074.148.392731</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>700.434.150</b>	<b>175.333.589.787</b>

Siborongborong, 30 Juni 2016  
Kepala,

Drh.Vierman  
NIP 19651220 199203 1 003

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1 DASAR HUKUM

*Dasar  
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. **Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.**

*Rencana  
Strategis*

#### A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

Siborongborong diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborongberkomitmen dengan visi *“Terwujudnya ternak babi, kerbau unggul dan sehat melalui pemuliaan serta dukungan yang kondusif.”*

Pendekata  
n  
Penyusuna  
n Laporan  
Keuangan

### **A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah sebagai berikut:



Pendapatan	<b>(1) Pendapatan</b> Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan <b>menurut klasifikasi sumber pendapatan.</b>
Belanja	<b>(2) Belanja</b> Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan <b>menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.</b>
Aset	<b>(3) Aset</b> Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.  Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset  
Lancar

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan **atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.**

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :**

- **harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;**
- **harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
- **harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.**

Aset Tetap

**b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2016 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang  
Jangka  
panjang

**c. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset  
lainnya

**d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

**Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.**

Kewajiban

**(4) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas  
Dana

**(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan  
Piutang  
Tak  
Tertagih

**(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010

tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 5. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

#### (7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

**Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi Dalam Pengerjaan ( KDP )
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d.40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah  
Rp.1.407.986  
.427,-.*

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp.1.407.986.427,-. Pendapatan Negara dan Hibah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

Uraian	SEM. I 2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Penjualan hasil Peternakan dan perikanan	344.100.000	368.000.000	106,94
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.900.000	2.572.227	43,59
3. Pendapatan denda keterlambatan Penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	2.294.200	0
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7.370.000	0
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.027.750.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>350.000.000</b>	<b>1.407.986.427</b>	<b>402,28</b>

Berdasarkan Tabel 7. Realisasi Pendapatan SEM. I TA 2016 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Rp. 1.407.986.427,-.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Naiknya Produksi bibit babi dan kerbau di BPTUHPT Siborongborong.
2. Naiknya Distribusi bibit babi dan kerbau di BPTU HPT Siborongborong
3. Pemindahtanganan BMN Lainnya
4. Pendapatan Bea Lelang
5. Denda Keterlambatan
6. Kembali Belanja Pegawai Pusat
7. Kembali Belanja Barang.

Pada semester I TA 2016, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong memperoleh pendapatan Penjualan hasil peternakan, Pendapatan sewa gedung dan bangunan, Pendapatan denda keterlambatan Penyelesaian pekerjaan pemerintah dan Penerimaan pendapatan pemindah tanganan BMN.



Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Sem. I TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI SEM. I T.A. 2016	REALISASI SEM. I T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Penjualan hasil Peternakan dan perikanan	368.000.000	279.000.000	24,18
2. Pendapatan Sewa Tanah,	2.572.227	3.044.862	(15,52)
3. Pendapatan denda	2.294.200	9.891.442	(76,81)
4. Penerimaan Kembali Belanja	7.370.000	0	100
5. Penerimaan Kembali Belanja	1.027.750.000	0	100
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.407.986.427</b>	<b>392.067.438</b>	<b>61,41</b>

## B.2 Belanja Negara

Realisasi

Belanja

Negara Rp.

3.890.614.03

1,-

Realisasi belanja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak pada Semester II TA 2016 adalah sebesar Rp. 45.228.396.893,-. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2016 tersaji pada Tabel 9

Tabel 9

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	5.987.429.000	2.136.141.139	35,68
Belanja Barang	13.102.254.000	1.633.719.892	12,47
Belanja Modal	14.348.290.000	120.753.000	0,84
Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>33.437.973.000</b>	<b>3.890.614.031</b>	<b>11,64</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Belanja Netto</b>	<b>33.437.973.000</b>	<b>3.890.614.031</b>	<b>11,64</b>

Berdasarkan Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) Sem.I TA 2016 dan Sem. I 2015 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Sem.I TA 2016 mengalami penurunan sebesar 32,37 persen dibandingkan realisasi belanja pada Sem.I TA 2015.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10  
Perbandingan Realisasi Belanja  
Sem. I TA 2016 dan Sem. I 2015

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Sem.I. T.A. 2016	REALISASI Sem I. T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja	2.136.141.139	2.342.355.946	(9,65)
Belanja Barang	1.633.719.892	2.321.026.260	(42,07)
Belanja Modal	120.753.000	97.540.000	19,22
Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.890.614.031</b>	<b>4.760.922.206</b>	<b>22,37</b>

Realisasi  
Belanja  
Pegawai Rp.  
2.202.061.1  
39,-

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong pada Sem. I TA. 2016 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vakasi.

Realisasi Belanja Pegawai Sem.I TA. 2016 dan Sem. I TA. 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.2.202.061.139 dan Rp. 2.438.225.946,- Berdasarkan Tabel 10, realisasi belanja Sem. I TA. 2016 mengalami penurunan Rp 236.164.807 sebesar 22,37 persen dari realisasi belanja Sem.I TA.2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya mutasi pegawai

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan  
Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir  
30 Juni 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SEM.I T.A. 2016	REALISASI SEM.I T.A. 2015	Nai k (Turun %)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.136.141.139	2.342.355.946	(9,65)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja Honorarium	65.920.000	95.870.000	(45,43)
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Vakasi	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.202.061.139</b>	<b>2.438.225.946</b>	<b>(10,72)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>2.202.061.139</b>	<b>2.438.225.946</b>	<b>(10,72)</b>

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 adalah masing-masing senilai Rp. 2.202.061.139,- dan Rp. 2.438.225.946,-.

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Sem. I TA 2016 dan Sem. I TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 398.783479 dan Rp.2.671.698.239.00

Berdasarkan Tabel 12, Realisasi Belanja Barang Sem.II TA 2015 mengalami penurunan Rp. 2.272.914.760.00 atau 85,07 persen dari Realisasi Belanja Barang Sem.II TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain adanya perubahan pemotongan anggaran/penghematan.

Realisasi  
Belanja  
Barang Rp.  
5.705.286.57  
5

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub  
Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir  
**30 Juni 2015**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2016	REALISASI T.A. 2015	Naik (Turun)
Belanja Barang	1.633.719.892	2.321.026.260	(42,07)
Operasional Belanja	3.769.861.031	5.560.787.301	(47,51)
Barang Non Operasional	272.492.100	237.950.000	12,676
Belanja Jasa	29.213.552	35.419.640	(21,24)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.705.286.575</b>	<b>8.155.183.201</b>	<b>(42,94)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>5.705.286.575</b>	<b>8.155.183.201</b>	<b>(42,94)</b>

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 89.622.500 dan Rp. 2.072.967.000.

Berdasarkan Tabel 13, Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami penurunan sebesar 95,68 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan peralatan dan mesin traktour
2. Adanya pembangunan gedung pagar pengaman ternak
3. Pemasangan jaringan komunikasi dan informasi untuk mendukung rencana kerja strategis organisasi.

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA. 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A 2014	Naik (Turun)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.753.000	94.040.000	22,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3.500.000	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>120.753.000</b>	<b>97.540.000</b>	<b>19,22</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>120.753.000</b>	<b>97.540.000</b>	<b>19,22</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Aset Lancar

Aset Lancar  
Rp.579.681.150,-

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 579.681.150 dan Rp. 442.796.000 .

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada BPTU HPT Siborongborong Semester II per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 14.

Tabel.14  
Rincian Aset lancar per 30 Juni 2016 dan 2015

No.	Aset Lancar	TA 2016	TA 2015
1	Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. 579.681.150	Rp. 442.796.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 579.681.150</b>	<b>Rp. 442.796.000</b>

#### C.1.1 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah senilai Rp. 0 dan Rp. 47.830.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan

Uraian	30-Juni-16	30-Juni-15
Barang Konsumsi	0	8.375.000
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	39.455.000
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>47.830.000</b>

Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan 2015 tersaji sebesar Rp.120.753.000 dan Rp. 174.890.793.787. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong per 30 Juni 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 16  
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2016	T.A 2015
1	Tanah	0	165.458.400.000
2	Peralatan dan Mesin	120.753.000	3.113.783.233
3	Gedung dan Bangunan	0	8.751.039.599
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	1.663.471.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	3.500.000
Jumlah		120.753.000	178.990.1933.832
Akumulasi Penyusutan Aset		0	4.099.400.045
Nilai Buku Aset Tetap		120.753.000	174.890.793.787

Aset Tetap  
Rp.120.753.  
000

### C.2.1 Tanah

Tanah Rp  
165.458.400.  
000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing senilai Rp 165.458.400.000,00 dan Rp 165.458.400.000,00. Tidak ada perbedaan antara belanja modal tanah dengan perolehan tanah dari transaksi Daftar aset tanah per 30 juni 2016 disajikan pada tabel 17.

Mutasi aset tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Mutasi aset tanah per tanggal laporan

Uraian	Intrakomptabel
A. Saldo Awal	165.458.400.000
B. Mutasi Tambah	0
C. Mutasi Kurang	0
D. Saldo Akhir	165.458.400.000

Tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan.

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan  
dan Mesin  
Rp  
7.631.933.149  
,-

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp 120.753.000 dan Rp 3.113.783.233. Ada perbedaan antara belanja modal peralatan dan mesin dengan perolehan dari transaksi pembelian. Terdapat perbedaan antara sejumlah belanja modal peralatan dan mesin dengan perolehan aset tetap dikarenakan terdapat pembelian belanja barang menggunakan belanja modal dan penghapusan barang.

Mutasi nilai aset peralatan dan mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Mutasi nilai aset peralatan dan mesin pertanggal laporan

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
<b>A. Saldo Awal</b>	<b>7.511.058.149</b>	<b>122.000</b>	<b>7.511.180.149</b>
<b>B. Mutasi Tambah</b>	<b>120.753.000</b>	<b>0</b>	<b>120.753.000</b>
Pembelian	120.753.000	0	120.753.000
<b>C. Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Saldo Akhir</b>	<b>7.631.811.149</b>	<b>122.000</b>	<b>7.631.933.149</b>

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp120.753.000 (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian Laptop Acer P248M sebanyak 8 unit/Rp 76.876.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
2. Pembelian Laptop Lenovo 11e 001D sebanyak 2 unit/Rp 26.377.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
3. Pembelian Printer Epson L310 5 unit/Rp 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp. 13.335.099.135 dan Rp 13.335.099.135. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset gedung dan bangunan 30 Juni 2016 adalah senilai Rp. 13.335.099.135 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan. Mutasi nilai aset Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Mutasi nilai aset Gedung dan Bnagunan pertanggal laporan

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
<b>A. Saldo Awal</b>	<b>13.335.099.135</b>	<b>0</b>	<b>13.335.099.135</b>
<b>B. Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Saldo Akhir</b>	<b>13.335.099.135</b>	<b>0</b>	<b>13.335.099.135</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp.  
13.335.099.1  
35



Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp.  
2.329.632.00  
0

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp. 2.329.632.000 dan Rp. 2.329.632.000.

Mutasi nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pertanggal pelaporan

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Jalan dan Jembatan	997.310.000	0	0	997.310.000
Irigasi	666.161.000	0	0	666.161.000
Bangunan Air	666.161.000	0	0	666.161.000
<b>Jumlah</b>	2.329.632.000	0	0	2.329.632.000

Mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0

Aset Tetap  
Lainnya Rp.  
1.561.604.08  
0,-

#### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp. 1.561.604.080 dan Rp. 1.561.604.080.

Mutasi nilai aset Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Mutasi nilai aset Tetap lainnya pertanggal laporan

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
<b>A. Saldo Awal</b>	0	1.561.604.080	1.561.604.080
<b>B. Mutasi Tambah</b>	0	0	0
<b>C. Mutasi Kurang</b>	0	0	0
<b>D. Saldo Akhir</b>	0	1.561.604.080	1.561.604.080

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap Lainnya.

#### C.2.6 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 adalah Rp. 187.837.219.072 merupakan penjumlahan akumulasi penyusutan dari

Akumulasi

Penyusutan  
187.837.219.  
072,-

masing-masing Akun pada pos Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Akumulasi Penyusutan  
per 30 Juni 2016

Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Aset Lancar	827.979.000	0,44	0	0,00	827.979.000	0,44
Persediaan	827.979.000	0,44	0	0,00	827.979.000	0,44
Aset Tetap	185.447.635.9 92	99,5 6	1.561.604.0 80	100, 00	187.009.240.0 72	99,5 6
Tanah	165.458.400.0 00	88,8 2	0	0,00	165.458.400.0 00	88,0 9
Peralatan dan Mesin	7.631.811.149	4,10	122.000	0,01	7.631.933.149	4,06
Akumulasi Penyusutan	-2.481.659.305	-1,33	-122.000	-0,01	-2.481.781.305	-1,32
Gedung dan Bangunan	15.986.573.63 5	8,58	0	0,00	15.986.573.63 5	8,51
Akumulasi Penyusutan	-2.345.608.971	-1,26	0	0,00	-2.345.608.971	-1,25
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.663.471.000	0,89	0	0,00	1.663.471.000	0,89
Akumulasi Penyusutan	-582.754.516	-0,31	0	0,00	-582.754.516	-0,31
Aset Tetap Lainnya	0	0,00	1.561.604.0 80	100, 00	1.561.604.080	0,83
Konstruksi Dalam Pengerjaan	117.403.000	0,06	0	0,00	117.403.000	0,06
Aset Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>186.275.614.9 92</b>	<b>100, 00</b>	<b>1.561.604.0 80</b>	<b>100, 00</b>	<b>187.837.219.0 72</b>	<b>100, 00</b>

## KEWAJIBAN

Kewajiban  
Jangka  
Pendek  
Rp.  
579.681.15  
0,-

### C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2016 tersaji senilai Rp. 579.681.150,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong per 30 Juni 2016 disajikan pada Tabel 23.**

**Tabel 23**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

No	Aset Lancar	Jumlah
1	Utang Pada Pihak Ketiga	0
2	Uang Muka dari KPPN	Rp. 579.681.150
Jumlah		Rp. 579.681.150

#### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang  
Kepada  
Pihak  
Ketiga  
Rp 0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan masing-masing senilai Rp. 0.

**Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).**

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong per 30 Juni 2016 disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 24. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar	Rp. -	Kekurangan pembayaran gaji pegawai
2.	Belanja Pegawai Yang harus Dibayar	Rp. -	Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum dibayar
3	Utang Pada Pihak Ketiga	Rp. -	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
4	Dsb		
Total		Rp. -	

## EKUITAS

### C.6 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar dan kewajiban per 30 Juni 2016 dan 2015 tersaji pada tabel 19.

Tabel 25

Rincian Ekuitas dan Kewajiban Jangka Pendek

No.	Nama Perkiraan	TA 2016	TA 2015
1	Ekuitas	Rp 120.753.000	Rp 175.074.148..392
2	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 579.681.150	Rp 259.441.395
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 700.434.150</b>	<b>Rp 175.333.589787</b>

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Realokasi belanja Pegawai melebihi seratus persen ( 100 % ) dikarenakan tidak dilaksanakan revisi belanja Pegawai
2. Terjadinya penghematan Anggaran sehingga waktu pengadaan ternak kerbau tidak mencukupi
3. Pembangunan gedung kantor tidak terlaksana karena penghematan Anggaran.
4. Balai melaksanakan Rekon ke KPKNL Padang Sidempuan dan BAR sudah dikeluarkan tetapi aplikasi yang diberikan oleh KPKNL tidak sesuai dengan aplikasi yang terbaru sehingga akan melaksanakan Rekon ulang.